

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 PENELITIAN TERDAHULU**

Pembahasan yang akan dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu. Berikut ini uraian beberapa penelitian terdahulu:

##### **1. Wahdini & Suhairi(2006)**

Wahdini & Suhairi (2006) meneliti tentang persepsi akuntan terhadap overload standar akuntansi keuangan (SAK) bagi usaha kecil dan menengah. Tujuan penelitian adalah untuk melakukan analisis persepsi akuntan yang bekerja di bank dan kantor pajak terhadap adanya kewajiban UMKM dan usaha besar untuk memberikan pedoman satu SAK dalam menyusun laporan keuangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa SAK yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia memberatkan bagi UMKM.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diadakan adalah data primer dikumpulkan melalui studi lapangan dengan menyebar kuisioner kepada pemilik UMKM.

Adapun perbedaannya adalah sampel yang digunakan oleh Wahdini & Suhairi (2006) dalam penelitiannya adalah para akuntan yang bekerja di bank dan kantor pajak dimana mereka mempunyai pengetahuan tentang penerapan akuntansi dan berhadapan pada pelaku usaha besar maupun usaha kecil. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah para pelaku usaha kecil dan menengah yang hanya melakukan pencatatan sederhana.

## **2. Rozia Stefani (2010)**

Rozia Stefani (2010) meneliti tentang penerapan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pada UMKM dengan studi kasus pada UD. RZ ACCESSORIES. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan akuntansi yang ada pada UD. RZ ACCESSORIES. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Rozian Stefani adalah UD RZ. ACCESSORIES merupakan UMKM yang memiliki nilai ekonomi yang baik. Dari posisi neraca total aktiva lancar lebih besar dari total hutang dan itu merupakan kemampuan UD. RZ ACCESSORIES untuk memenuhi kewajibannya. Walaupun memiliki kinerja keuangan yang baik, akan tetapi UD. RZ ACCESSORIES masih memiliki kesulitan untuk mencatat persediaan barang. karena masih adanya barang yang tidak dicatat di buku persediaan. Hal itu di karenakan kurangnya penerapan system akuntansi di UD. RZ ACCESSORIES.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diakan adalah meneliti penggunaan SAK ETAP sebagai dasar pembuatan laporan keuangan dan pengusaha kecil (UMKM) sebagai obyek penelitian.

Adapun perbedaan kedua penelitian ini adalah peneliti sebelumnya meneliti tentang penerapan sistem akuntansi. Sedangkan pada penelitian yang akan diadakan ini meneliti tentang pemahaman pelaku usaha terhadap SAK ETAP.

## **3. Pratiwi dan Tituk (2011)**

Pratiwi dan Tituk meneliti tentang “Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)”. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor – faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kesimpulan

dalam penelitian ini ialah variabel pemahaman teknologi informasi yang berpengaruh terhadap kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), sedangkan variabel tingkat pendidikan pemilik dan karakteristik kualitatif laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).

Persamaan dari peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu sama-sama meneliti mengenai SAK ETAP. Perbedaan dari peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu peneliti terdahulu menguji faktor – faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), sedangkan peneliti saat ini menganalisis pemahaman SAK ETAP pada pelaku usaha UMKM Perorangan.

## **2.2 LANDASAN TEORI**

### **2.2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Sampai saat ini definisi UMKM belum disepakati oleh berbagai pihak yang terkait, misalkan kriteria yang digunakan bank adalah berdasarkan jumlah kredit yang diberikan dan Biro Pusat Statistik berdasarkan jumlah tenaga kerja. Oleh sebab itu, dalam Daftar Pertanyaan perlu dijelaskan tentang kriteria UMKM yang digunakan. Klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Instruksi Presiden No. 10 tahun 1999 tentang pemberdayaan Usaha Menengah. Dalam Inpres tersebut ditetapkan bahwa suatu usaha digolongkan skala kecil dan menengah jika memiliki kekayaan bersih sama atau di bawah Rp 10 miliar. Namun menurut UU No. 20 Tahun 2008 Bab 6 Pasal 6 menjelaskan kriteria UMKM adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - A. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

B. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

A. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

B. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

A. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

B. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

### **2.2.2 SAK ETAP**

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Dua kriteria yang menentukan apakah suatu entitas tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yaitu:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan

Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas yang signifikan jika:

- 1) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal;
  - 2) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebaga fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah:
- 1) pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha
  - 2) kreditur
  - 3) lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

- (a) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
- (b) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP (SAK ETAP, 2009).

### **2.2.3 Faktor yang mempengaruhi pemahaman SAK ETAP**

#### **1. Skala Usaha**

Skala usaha merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya

dengan melihat berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan dan berapa besar pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi (Hadiyahfitriyah, 2006). Holmes and Nicholls (1988) mengemukakan bahwa tingkat informasi akuntansi yang disediakan tergantung pada skala usaha yang diukur dengan perputaran dan jumlah karyawan. Perusahaan didirikan untuk tujuan dapat menjaga kelangsungan usahanya. Perusahaan yang berkembang ditandai dengan perubahan aset dan jumlah karyawannya. Semakin besar skala usahanya akan mempengaruhi penyediaan dan penggunaan informasi akuntansinya.

## 2. Jenis Usaha

Jenis usaha mempunyai efek terhadap persiapan dan penggunaan informasi akuntansi sehingga hal ini memperlihatkan bahwa sektor usaha mempengaruhi jumlah informasi akuntansi yang dibutuhkan dalam operasional perusahaan. Hadiyahfitriyah (2006) mengelompokkan tujuh jenis usaha dan memperlihatkan bahwa informasi akuntansi tambahan relatif besar digunakan oleh sektor industri, dibandingkan dengan sektor yang lain.

## 3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Andrew E. Sikula (1981;145) mengemukakan bahwa: “Perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi”.

### 3 SDM

George Milkovich dan Paul C. Nystrom (Dale Yoder, 1981:173) mendefinisikan bahwa: “Perencanaan tenaga kerja adalah proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat, yang secara otomatis lebih bermanfaat”. Perencanaan SDM harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, organisasi dan kepentingan nasional. Tujuan perencanaan SDM adalah menghubungkan SDM yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang untuk menghindari mismanajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

### 4. Teknologi

Teknologi informasi dan sistem informasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sistem informasi yang baik selalu membutuhkan teknologi informasi sebagai media untuk pemrosesan dari sebuah masukan menjadi keluaran. Teknologi yang baik akan menyediakan informasi yang berkualitas sesuai dengan sistem yang didesain untuk pemrosesan data.

Rockart (1995) dalam Irwansyah (2003) menyatakan bahwa teknologi informasi merupakan sumber daya keempat setelah sumber daya manusia, sumber daya uang, dan sumber daya mesin yang digunakan manajer untuk membentuk dan mengoperasikan perusahaan. Dengan demikian, teknologi sistem informasi tidak diragukan lagi atas perannya dalam keterkaitan rangkaian beragam aktivitas.

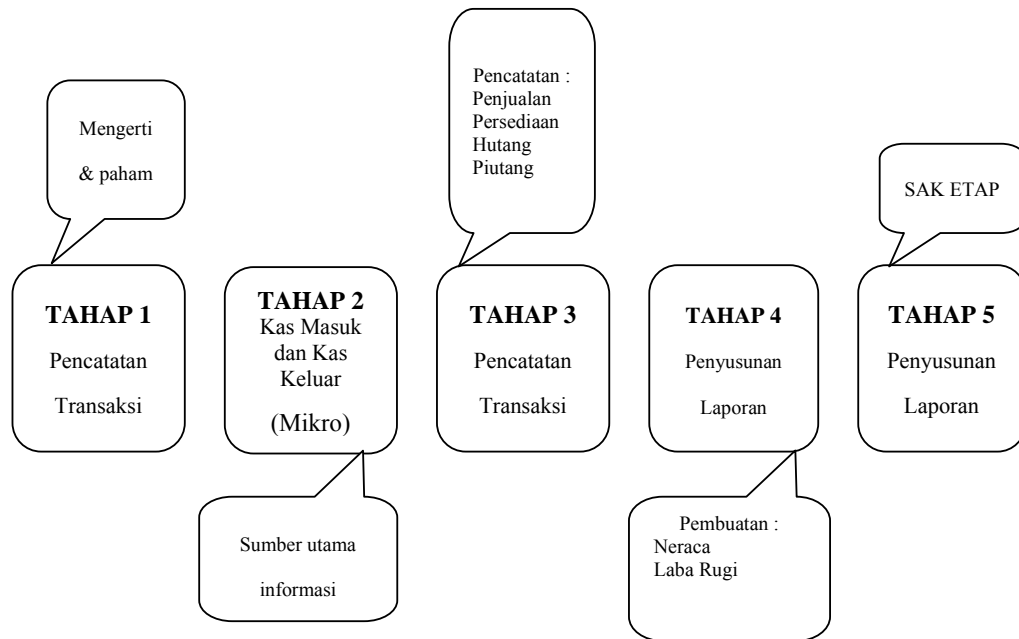
Nugroho (1994) menyatakan, “Dengan memanfaatkan sistem informasi, diharapkan suatu perusahaan mampu menggali potensi dirinya dan memanfaatkannya secara maksimal dalam rangka meraih keunggulan didalam persaingan”. Sistem informasi suatu perusahaan akan dapat berhasil tergantung

bagaimana sistem itu dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan pemanfaatan teknologi yang digunakan (Goodhue, 1995, dalam Jumaili, 2005).

Penggunaan teknologi dalam sistem informasi dapat memudahkan pengguna untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Semakin canggih teknologi yang digunakan, maka akan semakin berkualitas informasi yang dihasilkan.

#### 2.2.4 Pemahaman SAK ETAP pada UMKM

Penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM tahun 2009 membagi tahapan pemahaman laporan keuangan bagi UMKM menjadi lima tahap seperti yang disajikan dalam gambar berikut :



**Gambar 2.1 Tahapan Implementasi Laporan Keuangan**

Sumber: Bank Indonesia. 2009. *Kajian Mengenai Rumusan Standar Minimum Laporan Keuangan dan Business Plan untuk UMKM*. Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM. Hal 44.



Pada tahap pertama merupakan langkah awal pengenalan manfaat perlunya pencatatan transaksi. Langkah yang diperlukan pada tahap ini yaitu penyelenggaraan sosialisasi secara massif dalam bahasa yang sederhana tentang perlunya setiap unit usaha untuk melakukan pencatatan transaksi, bagaimanapun sederhana unit usahanya. Sehingga pelaku usaha mengerti dan memahami manfaat pencatatan, kemudian menimbulkan kesadaran untuk mulai melaksanakan pembukuan.

Tahap kedua adalah sasaran minimal yang seharusnya dapat dicapai oleh UMKM. Karena setiap unit usaha pasti memiliki pencatatan berupa kas masuk dan kas keluar. Walaupun format pencatatannya masih sangat sederhana. Pada umumnya pencatatan kas bagi UMKM, sebatas untuk mengetahui selisih lebih (untung) atau selisih kurang (rugi) serta untuk mengetahui jumlah uang yang terdapat dalam kotak penyimpanan uang.

Tahapan ketiga diharapkan dapat dilakukan oleh entitas UMKM minimal pada skala mikro, yaitu tahap-tahap yang lebih intensif dalam melakukan pencatatan transaksi, antara lain:

a. Pencatatan penjualan.

Pencatatan ini dilakukan secara harian yang berisi tentang jumlah penerimaan dan penjualan barang, jenis barang apa saja dengan harga berapa, serta kemana saja barang tersebut terjual.

b. Pencatatan persediaan barang.

Pencatatan ini masih ada hubungannya dengan pencatatan penjualan, karena berkaitan dengan jumlah barang yang masih tersedia, perlu pembelian kembali atau tidak, serta jenis barang yang paling diminati oleh pembeli.

c. Pencatatan hutang.

Pencatatan ini dapat dipisah-pisahkan berdasarkan kepada siapa pengusaha

berhutang, yaitu pembelian barang yang masih belum dibayar (kepada pemasok) dan hutang-hutang kepada pihak ketiga contohnya bank, koperasi atau unit pinjaman lainnya. Termasuk juga hutang kepada pemilik usaha yang harus dipisahkan pencatatannya antara kepentingan pribadi dengan usahanya.

d. Pencatatan piutang.

Pencatatan ini hampir sama dengan pencatatan hutang yang harus dipisahkan. Perlunya pencatatan kepada siapa pengusaha melakukan penjualan barang yang masih belum dibayar (kepada pembeli), atau kepada pihak-pihak lain yang meminjam uang sehingga timbul suatu kewajiban bagi mereka untuk membayar dilain hari.

Pada tahap keempat diharapkan dapat dilakukan oleh entitas UMKM untuk skala kecil agar dapat menyusun laporan keuangan dari pencatatan sebelumnya yang telah dilakukan. Tahap ini telah mencakup seluruh aspek minimal dalam membuat laporan rugi/laba maupun neraca. Walaupun mungkin akan masih banyak kekurangan.

Akhir tahap adalah penyusunan laporan keuangan yang *auditable*. Setelah pelaku usaha mampu membuat laporan keuangan sederhana, maka diharapkan mulai mengalami peningkatan terutama seluruh pencatatan telah lengkap dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi UMKM (SAK ETAP). Tahapan ini diharapkan dapat dicapai oleh UMKM dengan skala menengah. Karena secara organisasi lebih besar dengan kemampuan dari segi finansial mampu untuk memisahkan tenaga khusus yang menangani keuangan serta mulai menggunakan sistem maupun perangkat lunak akuntansi.

Pemahaman informasi akuntansi juga mengalami hambatan-hambatan (Zhou, 2010) antara lain:

Software yang digunakan tidak sesuai dengan situasi yang sebenarnya dihadapi oleh UKM. Mereka mengalami kesulitan untuk menemukan software yang dibutuhkan, karena para pengembang teknologi informasi tidak membuat software khusus untuk UKM. Para pelaku usaha kurang memberikan perhatian terhadap pengembangan informasi akuntansi usahanya. Mereka lebih memfokuskan diri bagaimana usahanya dapat terus berjalan. Para pelaku usaha tidak dapat mengevaluasi informasi akuntansi secara benar dan obyektif. UKM masih kekurangan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang memadai akan informasi akuntansi.

### 2.2.5 KERANGKA PEMIKIRAN



**Gambar 2.2**

**Kerangka Pemikiran**